

KEGAGALAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

Edwin Septian Kambey
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTARK

IJEPA merupakan singkatan dari Indonesia *Japan Economic Partnership Agreement* yang merupakan kerjasama bilateral ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang disepakati guna menghasilkan manfaat secara adil, seimbang dan terukur bagi kedua negara. Namun pada implementasinya tidak efektif bagi Indonesia karena tidak memberikan keuntungan. Tulisan ini membahas faktor-faktor ketidakefektifan implementasi IJEPA bagi Indonesia. Penulis berargumen bahwa ketidakefektifan implementasi IJEPA bagi Indonesia disebabkan pertama, karena tidak efektifnya *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC) dalam pengembangan sektor industri-industri di Indonesia karena dipengaruhi kelemahan konsep MIDEC, banyaknya kendala dalam implementasi MIDEC serta rendahnya pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJEPA dari pelaku usaha Indonesia. Kedua, Indonesia tidak efektif menciptakan keunggulan kompetitif industrinya terhadap Jepang karena disebabkan kondisi faktor produksi yang kurang kompetitif, kondisi konsumen dalam negeri yang lebih tertarik membeli produk luar negeri, keberadaan industri nasional yang sebagian besar masih mengandalkan bahan baku impor serta banyaknya perusahaan luar negeri yang masuk berkompetisi ke Indonesia.

Kata kunci : *IJEPA, Kerjasama Bilateral, Indonesia, Jepang*

PENDAHULUAN

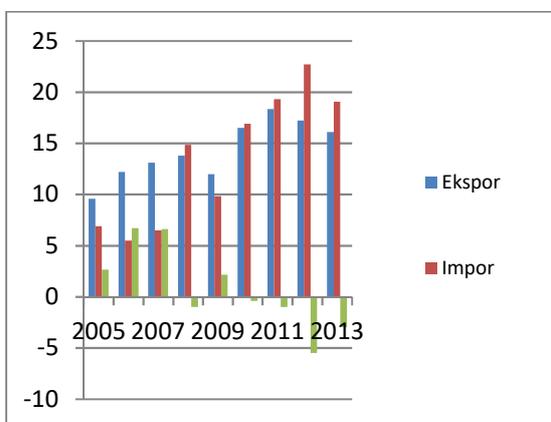
Tulisan ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) bagi Indonesia tahun 2008-2013. IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) merupakan kerjasama bilateral pertama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang memasuki tahun 2000-an terjalin semakin kompleks. Pada Juni 2003 Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menawarkan proposal ke pemerintahan Indonesia untuk

pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA) kedua negara. Setelah proses perundingan akhirnya kedua negara sepakat membentuk *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh kedua kepala pemerintahan di Jakarta. Perjanjian ini disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara adil, seimbang, dan terukur melalui tiga pilar utama yaitu liberalisasi (*liberalization*), fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*), dan kerjasama (*cooperation*) melalui pengembangan kapasitas (*capacity*

building) untuk sektor-sektor industri prioritas.

Dalam pelaksanaannya IJEPA tidak efektif bagi Indonesia karena tidak memberi manfaat yang signifikan, dalam Diagram 1. terlihat pasca implementasi IJEPA neraca perdagangan Indonesia-Jepang sektor non migas terjadi defisit padahal sebelum adanya IJEPA cenderung surplus.

Diagram 1. Neraca Perdagangan Sektor Non Migas Indonesia dengan Jepang (Dalam Miliar US\$)



Sumber: Kementerian Perdagangan RI (diolah penulis)

Selanjutnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang ke Indonesia pasca implementasi IJEPA terjadi penurunan padahal sebelum adanya IJEPA terjadi peningkatan.

Diagram 2. Perkembangan Realisasi Investasi PMA dari Jepang ke Indonesia



Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Dilihat dari realisasi target produksi 4 sektor utama penggerak *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC) dalam kerangka IJEPA

hanya 1 sektor yakni sektor otomotif yang mencapai target produksi. Dalam sektor otomotif, Indonesia berhasil menjadi sebagai *produsen based* mobil dengan target produksi 1 juta unit (setara dengan *business opportunity* sebesar US\$ 10 miliar) dan sepeda motor dengan target produksi 7-8 juta unit (setara dengan *business opportunity* sebesar US\$ 8 miliar) pada tahun 2012. Di bidang elektrik dan elektronik, Indonesia menargetkan ekspor akan mencapai angka US\$ 15 miliar ke pasar dunia dan US\$ 3 miliar untuk konsumsi domestik pada tahun 2012 namun hingga tahun 2012 ekspor produk industri elektronik hanya mencapai US\$ 7,46 miliar. Untuk *construction machinery*, Indonesia menargetkan US\$ 2,5 miliar (setara dengan US\$ 2 miliar dari produksi 10.000 unit dan US\$ 0,5 dari nilai ekspor *componen & parts*) pada tahun 2012, namun hingga tahun 2012 hanya mencapai 7,946 unit. Dan untuk bidang energi menargetkan adanya peluang bisnis sebesar US\$ 13 miliar pada tahun 2012 setelah pelaksanaannya tidak mencapai target.

Melihat permasalahan-permasalahan diatas maka dari itu tulisan ini akan mengkaji permasalahan dan anomali mengapa implementasi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) tidak efektif bagi Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur, yakni cara untuk menyelesaikan persoalan yang akan diteliti dengan menelusuri sejumlah sumber-sumber tulisan yang pernah diuat sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Di Indonesia

Dalam suatu kerjasama *Economic Partnership Agreement (EPA)* memiliki 4 prinsip dasar utama yaitu *Partnership, Regional Integration, Development, WTO compatible* (Philippe De Lamborde & Lakshmi Puri 2009). Dalam skema kerjasama IJEPA, implementasi prinsip *development* diwujudkan melalui pilar *cooperation* yakni Jepang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dari industri-industri yang ada didalam negeri Indonesia. Jepang menyepakati pembentukan *Manufacturing Industry Development Center (MIDEC)* sebagai wadah untuk pengembangan kapasitas industri-industri di Indonesia. MIDEC menjadi pusat jaringan kerjasama lintas institusi yang berperan dalam pengembangan kapasitas industri manufaktur Indonesia yang berdaya global. MIDEC bertujuan untuk mendorong pengembangan kapasitas dan kabapilitas industri manufaktur Indonesia di pasar dunia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kerjasama antar institusi/lembaga yang didukung oleh pemerintah Indonesia dan Jepang dalam memajukan empat sektor penggerak utama yaitu sektor *automotive, electrical & electronic, heavy equipment* dan *energy* dari 13 sektor pengembangan dalam MIDEC. Tujuan adanya MIDEC agar produk/jasa yang dihasilkan industri Indonesia bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh pasar Jepang. Dalam skema MIDEC akan dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan yaitu; *basic study,*

technical assistance/dispatch expert, training dan seminar/workshop.

Selama pelaksanaan MIDEC berdasarkan sektor penggerak utama, hanya sektor otomotif yang mencapai target produksi. Berbagai kendala dihadapi dalam pelaksanaan MIDEC sehingga target-target produksi tidak bisa tercapai. Berdasarkan rencana pengembangan 13 sektor dalam skema MIDEC, disepakati dalam awal perjanjian IJEPA bahwa akan melakukan upaya pengembangan industri yang mencakup 26 proyek yang dijabarkan dalam 94 kegiatan. Namun, realisasi pelaksanaan selama 2008-2013 hanya mencapai 24 proyek yang terdiri dari 84. Tampak dalam Tabel 1.

Tabel 1. Performa MIDEC Tahun 2008 - 2013

Cross Sectors	Projects	Spesific Sector	Projects
Metal Working	1	Automotive	3
Welding	1	Electronics	1
Mold & Dies	2	Steel	3
Energy Conservation	3	Textile	3
Export & Investment Promotion	2	Non-Ferrous	1
Small & Medium Enterprises	2	Chemical	2
Total	11	Food & Beverages	1
		Total	13

Hal ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya sepenuhnya target-target dalam implementasi MIDEC selama tahun 2008-2013 baik itu target produksi sektor penggerak utama maupun proyek-proyek kegiatan pengembangan industri di Indonesia.

Ketidakefektifan MIDEC bagi Indonesia disebabkan oleh kelemahan konsep MIDEC itu sendiri. Fungsi MIDEC sebagai motor penggerak pembangunan kapasitas industri guna meningkatkan daya

saing industri manufaktur Indonesia selama pelaksanaannya belum bisa meningkatkan daya saing industri nasional. MIDEK hanya difokuskan pada pembangunan berbagai industri penunjang yaitu industri-industri pembuat komponen dan *parts*, serta penguatan berbagai *common facilities*; seperti penguatan berbagai balai uji dan sistem sertifikasi, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, pengembangan atau pengadopsian standar, peningkatan teknik produksi serta peningkatan manajemen. Menurut Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri International (KPAII) Kementerian Perindustrian RI Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan selama pelaksanaan MIDEK dari 2008-2013 tidak menunjukkan hasil nyata. Padahal implementasi MIDEK semestinya merupakan kompensasi atas derasnya impor Jepang pasca diberlakukannya IJEP. Dalam kerangka MIDEK hanya berpusat pada pelatihan SDM, pengiriman ahli, kunjungan kerja ke industri-industri, studi dasar dan seminar. Kegiatan-kegiatan tersebut tak memiliki dampak langsung dalam peningkatan produktivitas industri nasional.

Kelemahan dalam implementasi MIDEK lainnya yaitu transfer ilmu yang selama ini dilakukan Jepang ke Indonesia dalam skema MIDEK melalui *basic study*, pelatihan, seminar/workshop belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini merupakan strategi Jepang, pihak Jepang tidak memberikan transfer ilmu sebanyak-banyaknya, karena ditakutkan industri Indonesia akan melebihi kapasitas dari Jepang. Dalam hal produk yang akan masuk ke pangsa pasar Jepang, Indonesia mengalami kesulitan karena Jepang

memberikan kualifikasi standar yang tinggi.

Berbagai permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan MIDEK lainnya juga, seperti tidak adanya pihak yang menangani secara khusus administrasi pengelolaan proyek MIDEK sehingga menyulitkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek. Inisiatif proyek MIDEK belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan peningkatan daya saing produk industri untuk ekspor. Skema kerjasama proyek MIDEK hanya difokuskan pada *basic study, dispatcgment of expert, training* dan seminar/workshop perlu menambah skema kerjasama ke arah penyediaan peralatan dan perbaikan infrastruktur industri manufaktur. Informasi terkait MIDEK belum tersosialisasi dengan baik kepada *stakeholder*, sehingga masih kebingungan untuk memberikan inisiatif proyek MIDEK baru.

Selain itu kelemahan industri nasional yang tidak inovatif menjadi kendala dalam keberhasilan MIDEK. Industri nasional belum bisa menghasilkan produk-produk variatif yang memiliki daya jual tinggi untuk dipasarkan ke luar negeri. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang inovatif dimana satu bahan baku bisa menghasilkan beragam jenis produk olahan yang berdaya jual tinggi. Dalam hal sektor pengembangan sektor industri masih terkesan luas dan tidak fokus. Artinya tidak fokus mengembangkan sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan dan pengembangan industri yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia.

2. Pengaruh Keunggulan Kompetitif Indonesia Terhadap

Pelaksanaan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Daya saing suatu negara dalam industri tertentu dapat ditingkatkan melalui konsep *competitive advantage of nations*. Konsep ini menjelaskan bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri domestiknya. Daya saing inipun dapat ditingkatkan hingga mencapai titik dimana industri domestik mampu bersaing dengan industri global. Menurut Michael Porter ada 4 atribut utama konsep keunggulan kompetitif negara yang menentukan dalam persaingan internasional yaitu: 1) Kondisi faktor, yaitu posisi negara dalam faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja terampil, infrastuktur serta IPTEK yang dibutuhkan untuk bersaing dalam industri tertentu. 2) Kondisi Permintaan, yaitu sifat permintaan dalam negeri atas produk atau jasa industri tertentu. 3) Industri pendukung, yaitu keberadaan industri terkait dan pendukung yang kompetitif secara internasional. 4) Strategi, struktur dan persaingan perusahaan yaitu kondisi bagaimana pemerintah mengatur perusahaan dibentuk, diorganisir, dikelola, serta sifat persaingan domestik (Michael Porter 1990).

Dalam konteks Indonesia, ketidakefektifan Indonesia menciptakan keunggulan kompetitif daya saing industrinya berkontribusi terhadap efektifitas implementasi IJEPA. Dalam hal daya saing Indonesia dengan Jepang, hampir 50% sektor produk Indonesia dibandingkan dengan Jepang jatuh dalam kategori penilaian lemah sekali. Menurut data, daya saing sektor produk antara Indonesia dan Jepang dalam Tabel. 4 menunjukkan bahwa dari 7.447 produk industri Indonesia, 3.736 (50%) dalam

kategori penilaian lemah sekali, kategori lemah 2.227 produk (30%), 1.472 produk (19,8%) masuk dalam kategori sedang, sedangkan dalam penilaian kategori produk indonesia yang kuat hanya 12 (0,2%).

Tabel 2. Daya Saing Produk Indonesia vs Jepang

Sektor	Kuat	Sedang	Lemah	Lemah Sekali
Industri Kimia Hilir	3	147	212	328
Industri Alat Angkut dan Transportasi Darat	3	79	260	219
Industri Minuman dan Tembakau	3	44	59	32
Industri Tekstil dan Produk Tekstil	1	554	459	428
Industri Elektronik dan Telematika	1	138	223	447
Industri Kimia Dasar	1	106	224	536
Industri Mesin	0	115	250	867
Industri Material Logam Dasar	0	101	281	596
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	0	98	109	182
Industri Makanan	0	84	120	73

Industri Maritim	0	6	30	28
Total	12	1472	2227	3736

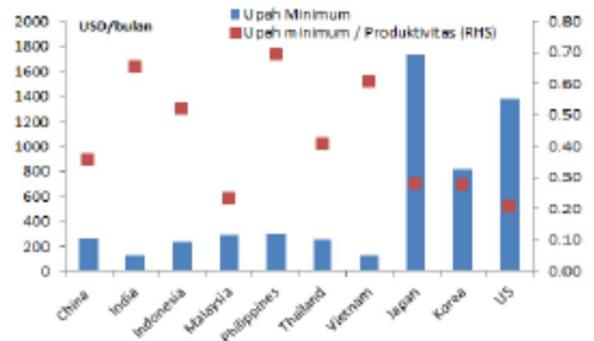
Sumber: Dirjen KPAII, Kemenperin RI

Dalam konteks daya saing produk Indonesia tersebut terjadi karena disebabkan secara internal Indonesia belum memiliki spesialisasi yang dapat diunggulkan untuk berkompetisi ke pasar Jepang. dalam hal ini Indonesia belum memiliki keunggulan kompetitif produknya yang berbeda dibandingkan Jepang. Sedangkan faktor eksternal yakni hadirnya negara pesaing besar lainnya seperti Cina terutama pada sektor industri tekstil dan produk tekstil. Karena pangsa pasar industri tekstil dan produk tekstil Indonesia di Jepang diambil alih oleh China, karena disebabkan industri China yang lebih maju dan perekonomian China yang sangat baik. Ketatnya penerapan *Non Tariff Measure* (NTM) yang ditetapkan Jepang terhadap produk Indonesia menjadi hambatan yang kompleks.

Selain itu kondisi faktor produksi seperti; tenaga kerja, logistik serta beberapa faktor lain yang kurang baik menjadi hambatan keunggulan daya saing Indonesia dibandingkan Jepang. Untuk kondisi tenaga kerja, terdapat biaya yang tinggi. Dalam Diagram 1. menunjukkan upah minimum terlalu tinggi (apabila mempertimbangkan produktivitas) jika dibandingkan dengan Jepang. Upah minimum yang terlalu tinggi menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pemindahan pabrik ke provinsi dengan Upah Minimum Regional (UMR) lebih rendah. Biaya pemecatan juga sangat tinggi, yaitu sekitar 50 kali gaji mingguan (dalam diagram 4.). Selain itu terdapat beberapa *implicit cost* seperti banyaknya *labor union* yang menyulitkan proses

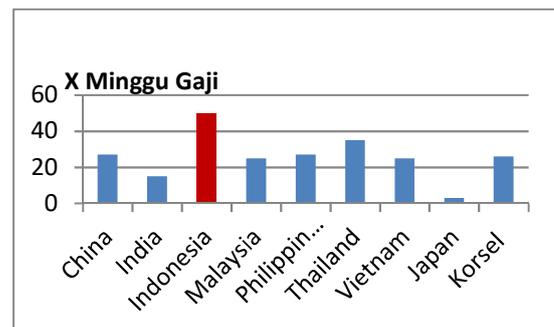
negosiasi, banyaknya demonstrasi, serta meningkatnya resiko operasional.

Diagram 3. Upah Minimum dan Produktivitas



Sumber : World Development Indicators (diolah penulis dari laporan Bank Indonesia)

Diagram 4. Redundancy Cost



Sumber : Global Competitiveness Index, WEF (diolah penulis dari laporan Bank Indonesia)

Dari sisi skill, terdapat permasalahan yang lebih serius, dalam penelitian World Bank tahun 2014 menyatakan bahwa 1) terdapat *skill mismatch*, 50% lulusan SMA/ sederajat dan 15% lulusan universitas bekerja di *unskilled position*; 2) 70% pengusaha manufaktur mengatakan sangat sulit untuk mengisi *skilled position*; 3) hanya 5% pekerja yang memperoleh *on-the-job training* formal.

Selanjutnya mengenai *Logistic Cost Index* (LCI) Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang. Dalam Tabel 9. Menunjukkan LCI Indonesia

mencapai 27% dari *Gross Domestic Product* (GDP) sedangkan Jepang hanya mencapai 10,6%.

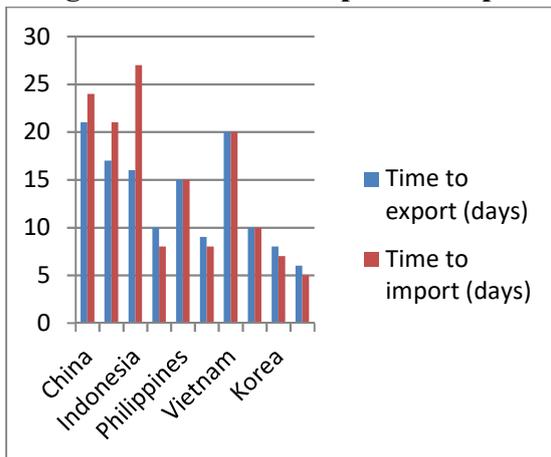
Tabel 3. Logistik Cost Index (%/GDP)

Indonesia	Malaysia	Vietnam	Jepang	USA
27	13	25	10,06	09,0

Sumber: Kementerian Perindustrian RI

Selain itu, dalam proses ekspor impor barang antara Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Waktu yang dibutuhkan untuk ekspor impor relatif lama dibandingkan Jepang. Hal tersebut dipengaruhi antara lain karena adanya hambatan akses darat dan proses bongkar muat dipelabuhan.

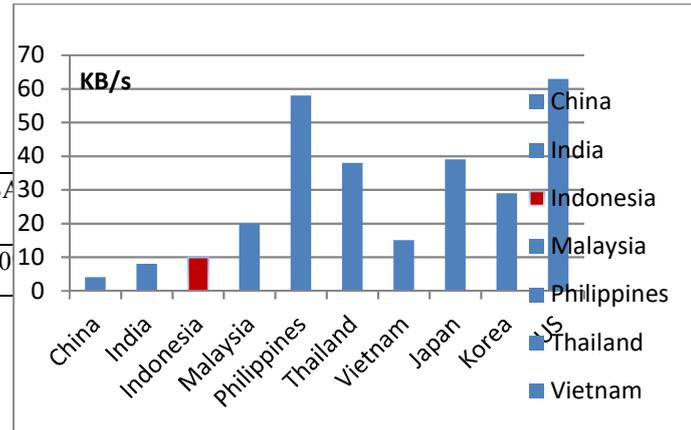
Diagram 5. Time To Export & Import



Sumber : Doing Business, World Bank (diolah penulis dari laporan Bank Indonesia)

Beberapa masalah lain juga seperti 1) kecepatan internet, *bandwidth*, harga *internetbroadband* tidak kompetitif, 2) kurangnya sertifikasi internasional dan *compliance* atas produk ekspor dan proses industri, 3) kurangnya lisensi teknologi, 4) listrik yang bermasalah, serta 5) regulasi tidak tepat sasaran.

Diagram 6. Kecepatan Internet



Sumber : Ookla Net Index (diolah penulis dari laporan Bank Indonesia)

Berdasarkan *The Global Competitiveness Report* tahun 2013-2014 Indonesia menempati peringkat 38. Peringkat pertama ditempati Swiss, peringkat kedua ditempati Singapura, peringkat ketiga ditempati Finlandia, sedangkan Jepang menempati peringkat ke 9. Menurut data *The Global Competitiveness Report* juga menyatakan faktor yang paling bermasalah untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan lemahnya infrastruktur. Perkembangan *competitiveness* infrastruktur di Indonesia bisa dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 4. Competitiveness Report Indonesia

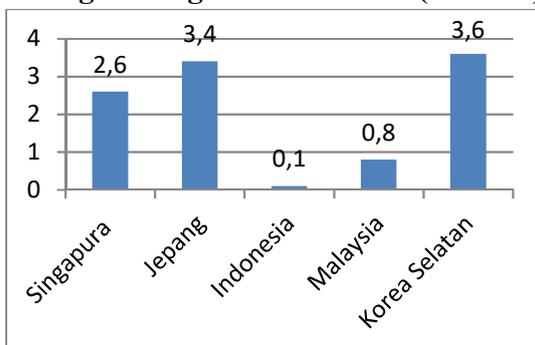
No	Faktor	Inde x					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
A	Infrastruktur	3,0	3,2	3,6	3,8	3,7	4,2
1	Kualitas Infrastruktur Keseluruhan	-	-	-	3,9	3,7	4,0
2	Kualitas Jalan	-	-	-	3,5	3,4	3,7
3	Kualitas Infrastruktur Kereta Api	-	-	-	3,1	3,2	3,5
4	Kualitas Infrastruktur Pelabuhan	-	-	-	3,6	3,6	3,9
5	Kualitas Infrastruktur Transportasi Udara	-	-	-	4,4	4,2	4,5
6	Kualitas	-	-	-	1,68	1,79	2,43

	Infrastruktur Jumlah Penerbangan				2	4	5
7	Kualitas Jaringan Listrik	-	-	-	3,7	3,9	4,3
8	Kualitas Jaringan Fix Telepon	-	-	-	3,8	3,7	-

Sumber : Global Competitiveness Report World Economic Forum (diolah penulis)

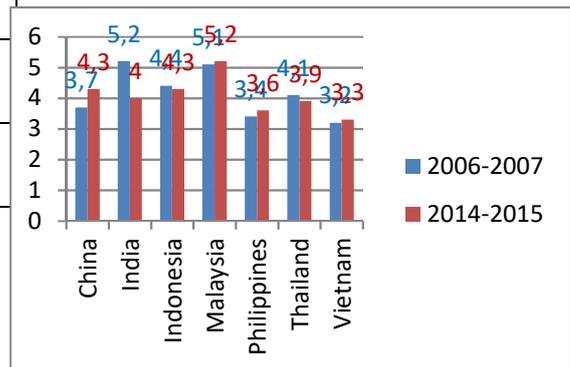
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan daya tambah agar dapat mempertahankan daya saing dalam jangka panjang tergantung pada kapasitas inovasi dari sektor industri masing-masing. Tapi dalam Diagram 8. dan Diagram 9. menunjukkan kesenjangan yang terjadi pada kapasitas inovasi Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun perusahaan. Alokasi anggaran untuk riset dan penelitian di Indonesia lebih rendah dibandingkan Jepang. Kebanyakan industri di Indonesia masih mengandalkan pembeli internasional untuk memberikan persyaratan spesifikasi desain dan teknik sehingga hanya memproduksi sesuai dengan spesifikasi. Hal ini membatasi kemampuan potensial sektor industri untuk dapat menciptakan inovasi dan bergabung pada *Global Production Networks (GPN)*.

Diagram 7. Pengeluaran Riset dan Pengembangan Tahun 2012 (% PDB)



Sumber : World Development Indicators (diolah penulis)

Diagram 8. Kualitas dari Lembaga Riset



Sumber: World Economic Forum (diolah penulis dari laporan Bank Indonesia)

Pada tingkat perusahaan, investasi pada riset dan pengembangan masih tergolong rendah. Institusi atau lembaga untuk mendukung pengembangan keahlian teknis ataupun desain pada sektor-sektor industri masih tetap lemah. Industri tekstil menjadi salah satu industri yang memiliki sekolah tinggi khusus teknologi tekstil di Bandung (setara D4), selain terdapat institusi swasta yang fokus pada pengembangan industri adibusana. Sementara itu sektor *ICT (information-communication technology)* baru terdapat satu Pusat Pendidikan Khusus Elektronika dan Telematika di Surabaya. Ada juga Balai Diklat Industri (BDI) yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian juga menyediakan pendidikan dan pelatihan bidang elektronika dan garmen.

Mengenai kondisi permintaan dalam negeri, Indonesia mengalami kendala mengenai produk dalam negeri yang kalah bersaing dengan produk buatan asing. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran konsumen tentang pemakaian produk dalam negeri. Kondisi ini dipengaruhi sifat *consumer xenocentrism* pembeli Indonesia karena mereka mempertimbangkan kualitas barangnya. Yang artinya menunjukkan bahwa konsumen mempersepsikan kualitas buatan asing lebih baik dibandingkan

produk buatan dalam negeri. Dari segi mutu produk, kebanyakan produsen di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjual produk berkualitas nomor dua di pasar domestik dan menjual produk kualitas nomor satunya di pasar luar negeri. Hal ini membuat konsumen dalam negeri berpikir lagi untuk membeli produk dalam negeri karena meskipun harganya lebih murah, tetapi untuk keamanan dan kenyamanan produk juga rendah. Selain itu juga masyarakat Indonesia pada umumnya telah melakukan pengaturan pada pola pikir mereka bahwa produk buatan asing selalu bahkan selamanya lebih bagus dibandingkan produk dalam negeri. Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah apabila memakai produk buatan asing, maka akan terkesan elegan dan mewah karena harganya yang cenderung lebih tinggi dan menjanjikan kualitas kelas dunia.

Selanjutnya mengenai permasalahan industri terkait dan pendukung industri di Indonesia karena industri nasional masih bergantung pada industri pemasok bahan baku impor. Menurut data Kementerian Perindustrian sekitar 64% dari total industri di Indonesia masih mengandalkan bahan baku, bahan penolong serta barang modal impor untuk mendukung proses produksi. Jumlah tersebut berasal dari sembilan sektor industri yakni; otomotif, permesinan dan logam, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain serta pulp dan kertas. Sekitar 64% tersebut mendominasi nilai produksi nasional sebesar 80% serta menyumbang 65% penyerapan tenaga kerja. Untuk sektor industri otomotif misalnya menurut data Kementerian Perindustrian RI, bahan baku lokal untuk membuat otomotif masih sangat rendah karena sebagian besar bahan

baku masih diimpor, rata-rata hanya kurang dari 10% bahan baku dari Indonesia. Contoh lain, untuk sektor industri elektronik yang menjadi masalah utamanya yaitu suplai dari produksi dalam negeri masih rendah karena produk jadinya hanya 34%, sedangkan komponennya sekitar 40% selain dari itu di impor. Sektor industri tekstil dan produk tekstil (PTP) juga masih bergantung impor untuk kebutuhan bahan baku produksinya. Indonesia mengimpor kapas sebagai bahan baku kain katun untuk keperluan industri tekstil sekitar 99,2% dari semua kebutuhan kapas nasional per tahun.

Mengenai keadaan strategi, struktur dan persaingan perusahaan di Indonesia terhadap daya saing nasional dapat dijelaskan contohnya dalam sektor otomotif dan tekstil dan produk tekstil (TPT). Sektor industri otomotif, kondisi persaingannya sangat ketat terutama dengan perusahaan luar negeri. Perusahaan luar negeri masuk sebagai pesaing industri otomotif nasional karena Indonesia menganut sistem perdagangan bebas, terutama dengan negara-negara ASEAN dan China. Di pasar internasional, industri otomotif nasional menghadapi pesaing produsen otomotif murah seperti China dan Indi. Kondisi persaingan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga bersaing sangat ketat, baik antar perusahaan didalam negeri maupun perusahaan diluar negeri. Dalam pasar internasional, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menghadapi perusahaan produsen murah dari vietnam, India, China dan Srilangka. Dengan banyaknya perusahaan dari luar negeri masuk ke Indonesia sangat mengganggu penciptaan daya saing produk dalam negeri.

PENUTUP

Ketidakefektifan implementasi IJEPA bagi Indonesia disebabkan oleh pertama, tidak efektifnya *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC) dalam hal pengembangan sektor industri-industri di Indonesia. Kedua, Indonesia tidak efektif menciptakan keunggulan kompetitif industri nasional terhadap Jepang karena dipengaruhi oleh kondisi faktor produksi, kondisi permintaan dalam negeri, keberadaan industri terkait dan penunjang serta strategi, struktur dan persaingan perusahaan di Indonesia.

Tidak efektifnya MIDEC untuk pengembangan industri-industri di Indonesia disebabkan pertama, kelemahan konsep MIDEC itu sendiri. MIDEC hanya difokuskan pada tiga kegiatan pokok seperti studi dasar (*basic study*), pelatihan (*for trainee & trainer*) dan teknologi (*technical assistance*) yang mana tidak memiliki efek langsung pada empat sektor riil untuk peningkatan produktifitas industri nasional yang memiliki daya saing internasional yang lebih terstandarisasi untuk masuk dalam pasar Jepang. Kedua, banyaknya kendala dalam implementasi MIDEC. Dalam implementasi MIDEC ditemui kendala seperti; pengusulan kegiatan yang lama, ketidaksesuaian implementasi kegiatan dengan *Term Of Reference* yang dibuat, periode kegiatan yang terlalu pendek, tidak maksimalnya transfer ilmu yang dilakukan pihak Jepang, kurangnya pihak yang memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek, inisiatif proyek belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan peningkatan daya saing produk industri untuk ekspor serta belum tersosialisasi informasi MIDEC kepada semua *stakeholder*. Ketiga, dalam pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJEPA relatif rendah dibandingkan dengan

beberapa SKA yang lain. Kendala pemanfaatan SKA Form IJEPA yakni seperti ketidaktahuan pelaku usaha akan manfaat tarif preferensi IJEPA, pelaku usaha tidak mengetahui persyaratan dan prosedur penertiban SKA, pembuatan SKA yang memakan waktu lama serta keterbatasan sumber daya manusia di berbagai instansi penerbit SKA.

Keunggulan kompetitif industri Indonesia berkontribusi terhadap ketidakefektifan implementasi IJEPA. Ketidakefektifan Indonesia dalam menciptakan keunggulan kompetitif industrinya terhadap Jepang disebabkan daya saing produk Indonesia masih sangat lemah serta belum adanya produk unggulan yang kompetitif untuk berkompetisi di pasar Jepang. Faktor pesaing eksternal China juga menjadi salah satu faktor penghambat Indonesia sulit menciptakan keunggulan kompetitifnya. Cina yang memiliki industri lebih maju membuat Indonesia menghadapi kesulitan dalam berkompetitif di pasar Jepang. Ketatnya penerapan *Non Tariff Measure* (NTM) Jepang terhadap produk Indonesia menjadi hambatan yang kompleks. Selain itu kondisi faktor produksi seperti tenaga kerja, logistik, infrastruktur yang kurang kompetitif menjadi penyebabnya. Mengenai kondisi permintaan dalam negeri, disebabkan oleh sifat *consumer xenocentrim* dimana psikologi pembeli di pasar Indonesia lebih tertarik terhadap produk luar yang dijual di dalam negeri. Dalam hal keberadaan industri terkait dan pendukung, sebagian besar industri nasional masih mengandalkan bahan baku impor yakni mencapai sekitar 64% industri nasional, Hal ini mengakibatkan biaya produksi banyak terserap untuk biaya impor, karena sedikit industri dalam negeri yang menjadi

pemasok bahan baku. Mengenai strategi, struktur dan persaingan perusahaan, dengan adanya persaingan ketat perusahaan dalam negeri dan luar negeri serta banyaknya perusahaan luar negeri yang masuk ke Indonesia mengganggu penciptaan daya saing produk dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, Septika Tri, 2015. "Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia Jepang Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral" Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Atmawinata, Achdiat, Dradjad Irianto, Lucia Diawati, dkk, 2008. "Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global", Kemenperin.
- Atmawinata, Achdiat, Dradjad Irianto, Lucia Diawati, dkk, 2009. "Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global", Kemenperin.
- Dam, Sjamsumar dan Riswandi, 1995 "Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan", Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Firdaus, Risky W., 2014 "Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement terhadap defisitnya Neraca Perdagangan Sektor Non-Migas Indonesia-Jepang 2008-2012". Universitas Airlangga.
- Gayatri, Triksaningtyas, 2007 "Analisa Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia dan Jepang dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)" Universitas Indonesia.
- Hidayat, A. Alimul, 2007 "Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data". Surabaya:Salemba.
- Holsti, K. J, 1988 "Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisa, Jilid II, terjemahan M. Tahrir Azahari. Jakarta: Erlangga.
- Keohane, Robert O, 1989 "Neoliberal Institutionalism: A Prespective in World Politics, In Internasional Institutions and State Power".
- Konsolas, Ioannis, 1999 "The Competitive Advantage Of The Nations: The Case OF Greece" University of London.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1987 "Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analitis". Jakarta: Binacipta.
- M, Nazir, 2003 "Metode Penelitian". Jakarta:Ghalia Indonesia, Cet ke-5.
- Mudriq, Sulfitri Hs, 2013 "Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Di Indonesia dalam Bidang Otomotif".
- Novita, 2016 "Xenocentrism : Perilaku Pembelian Konsumen Indonesia Pada Produk Asing Di Era Perdagangan Bebas" Universitas Bunda Mulia.
- Plano, Jack dan Roy Olton, 1990. "Kamus Hubungan Internasional" Bandung: Abardin.
- Porter, Michael, 1990. "The Competitive Advantage of Nation". Harvard Business Review.
- Prasetyo, P. Eko, 2012. "Stuktur dan Kinerja Industri Besi dan Baja Indonesia tidak Sekuat dan Sekokoh Namanya", Universitas Negeri Semarang.
- Purbolaksono, Arfianto, 2015 "Reviewing IJEPA: an Advantage or a Disadvantage for Indonesia?" dalam The Indonesia update Monthly review on Economic, Legal, Security, political, and Social Affairs. The Indonesian Institute.
- Ridwhan, Masagus M, Gunawan Wicaksono, dkk, 2015 "Analisis daya saing dan strategi industri nasional di era masyarakat ekonomi asean dan perdagangan bebas" Bank Indonesia.

- Salam, Aziza R, Stefiani Rayadiani dan Immanuel Lingga, 2012 “IJEPA Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia-Jepang, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Schwab, Klaus, 2013. “The Global Competitiveness Report 2013-2014” Genewa: World Economic Forum.
- Setiawan, Sigit, 2012. “Analisis Dampak IJEPA terhadap Indonesia dan Jepang”. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Stoot, David Adam, 2008. “*The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?* Dalam The Asia-Pasific Journal : Japan Focus. http://japanfocus.org/-David_Adam-Stott/2818/article.html

Dokumen

- Agreement Between The Republic of Indonesia And Japan For An Economic Partnership.
- Booklet Kementerian Perdagangan RI. “Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) : Menuju Genereal Review”. Kemendag RI, 2014.
- Joint Statement on Japan-Indonesia Summit Meeting.* 24 Juni 2003 http://www.mofa.go.jp/english/mf_review/361_03.html
- Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia, Kemendag RI. 2011.
- Kajian MIDEK (Manufacturing Industry Development Center) New Initiative Approach, Kemenperin RI, 2015.
- Laporan Analisis Daya Saing Indonesia dan ASEAN lainnya Di Pasar Produk Utama Indonesia, Kemendag RI, 2015.
- Laporan Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, Kemenperin, 2016..

Sumber Online

- CNN Indonesia, 15 Januari 2016. “Indonesia Tagih Janji Jepang Perkuat Industri Nasional”, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160115145154-92-104569/indonesia-tagih-janji-jepang-perkuat-industri-nasional/>
- Rendi A. Witar “Japan, RI plan new investment, trade deal” The Jakarta Post, 16 Desember 2004. <http://www.bilaterals.org/?japan-ri-plan-new-investment-trade>
- The Japan Times, 7 November 2004. “Indonesia Stays to Committed to FTA with Japan”, http://www.bilaterals.org/articlephp3?id_article=942